

KORAN
DIGITAL

radar.

MEDIA

TERDEPAN

EDISI JUMAT
27 OKT 2023



KALTIM TERIMA 7 SERTIFIKAT PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA



DPKD KALTIM SELAMATKAN
ARSIP COVID-19
SEBAGAI CATATAN SEJARAH



Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud), Kemendikbudristek, Hilmar Farid bersama seluruh perwakilan provinsi usai penyerahan sertifikat di Kawasan Wisata Kota Tua, Halaman Museum Fatahillah, Jakarta. (Foto : Nicha / Media Kaltim)

Kaltim Terima 7 Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Takbenda

JAKARTA - Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Budaya Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan 213 Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan 19 Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Menariknya, dalam kesempatan ini provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima sebanyak 7 sertifikat penetapan Warisan Budaya Takbenda. Antara lain, sertifikat untuk budaya Mecaq Udat, Besoyong, Betore, Jamit Burai, Banaq Sawaq Pelulukng Peruku, Kuda Gepang Kutai Kartanegara dan Jatung Utang Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kemendikbudristek, Hilmar Farid menyampaikan bahwa penetapan ini tidak boleh berhenti hanya sampai penyerahan sertifikat saja. Namun yang penting adalah tindak lanjut atau rencana aksi ke depan sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya memajukan kebudayaan bangsa yang dapat memberi manfaat untuk masyarakat luas.

"Warisan Budaya yang telah ditetapkan harus dilestarikan melalui kegiatan-kegiatan nyata seperti festival, seminar, sarasehan, workshop atau bahkan dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang membangkitkan semangat pelestarian," ujarnya di Kawasan Wisata Kota Tua,

Halaman Museum Fatahillah, Jakarta, Rabu (25/10) malam.

Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2023 mengambil tema "Melindungi Budaya, Melindungi Bumi", kata Hilmar, merupakan kristalisasi dari upaya perlindungan ekosistem kebudayaan secara menyeluruh. Melalui tema ini, perlindungan kebudayaan di Indonesia diharapkan tidak hanya mengarah pada Warisan Budayanya saja tetapi juga menyentuh kesatuan lingkungan alam pendukungnya.

"Saya ucapkan selamat kepada Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati/Wali kota, Lembaga, Pemilik, Pengelola, dan tidak lupa juga kepada para budayawan serta pihak-pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya demi majunya budaya bangsa Indonesia," tutur Hilmar.

Kepada Tim Ahli dan semua pihak yang terlibat dalam Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang telah bekerja sejak awal hingga puncak Apresiasi Warisan Budaya Indonesia ini, Hilmar menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi, bantuan, dan kerja samanya.

"Untuk masyarakat, saya berpesan untuk senantiasa menjaga budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Semoga warisan budaya Indonesia akan tetap lestari sepanjang masa sebagai tanggung jawab kepada

anak cucu kita," tutupnya.

Masih di tempat yang sama, Direktur Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbudristek, Judi Wahjudin, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil jerih payah dan kerja keras semua pihak antara lain para Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan, Lembaga, Para Maestro, Pemilik dan Pengelola Cagar Budaya, pelaku serta masyarakat terkait.

"Acara yang dilaksanakan pada malam ini adalah bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, pelaku dan komunitas budaya, serta pemilik dan pengelola Cagar Budaya yang turut mendukung Penetapan Warisan Budaya sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa," pungkasnya.

Diketahui, selain penyerahan apresiasi kepada perwakilan daerah dan para pemangku kepentingan, acara malam apresiasi juga disemarakkan dengan berbagai pertunjukan, pameran, dan stand/booth kuliner tradisional yang disediakan bagi pengunjung. Penampilan seni pertunjukan dan aneka kuliner dari berbagai daerah turut ambil bagian dari apresiasi Warisan Budaya Indonesia tahun 2023.

Pewarta : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKASIS PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Belum Ada Laporan Penyakit Monkeypox di Kaltim

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dr. Jaya Mualimin bersyukur pasalnya hingga saat ini penyakit cacar monyet (monkeypox) belum ditemukan di Kaltim.

Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengatakan terkait kasus positif cacar monyet pertama ditemukan di Jakarta pada Agustus 2022 lalu.

Pada 13 Oktober 2023 kasus bertambah satu, 19 Oktober 2023 bertambah lagi satu kasus, dan 21 Oktober 2023 bertambah 5 kasus dan 23 Oktober 2023 bertambah 2 kasus positif cacar monyet.

Sementara itu, 11 orang yang menjadi suspek monkeypox telah menjalani pemeriksaan di laboratorium PCR.

Kementerian Kesehatan juga menegaskan vaksin cacar monyet akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia.

Untuk saat ini, vaksin diberikan kepada kelompok prioritas yang memiliki risiko tinggi, yaitu pelaku hubungan sesama jenis.

"Alhamdulillah, belum ada kasus cacar monyet atau Monkeypox di Kaltim. Sampai sekarang, Kaltim menjadi wilayah yang bebas dari ancaman cacar monyet," kata Kepala Dinkes Kaltim dr. Jaya Mualimin, Kamis (26/10/2023).

Kendati demikian, dr. Jaya tetap meminta kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap penyebaran penyakit cacar monyet.

"Meski belum ada di Kaltim, kita terus waspada dengan penyakit menular ini. Jika ada gejala-gejala tersebut, masyarakat diminta dengan cepat mengunjungi faskes terdekat," tutup dr. Jaya. **(ADV/nta)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**DINAS KESEHATAN****GERMAS**
Germas Masyarakat
Hidup Sehat<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dr. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKOR PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
PS GUMBERSARI KALTIMdr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Data Oktober 2023 kematian Ibu sebanyak 46 orang dan bayi 302. (Istimewa)

ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI, KOTA SAMARINDA TERTINGGI DI KALTIM

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan angka kematian ibu dan anak menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data per Oktober 2023, jumlah kematian ibu sebanyak 46 orang dan bayi 302 orang.

"Angka kematian ibu dan bayi di Kaltim masih tinggi, meski sudah ada upaya peningkatan pelayanan kesehatan," jelas Kepala Dinkes Kaltim Dr. Jaya Mualimin, Kamis (26/10/2023).

Jaya menambahkan sebaran kematian ibu di Kaltim tahun 2023 sampai bulan Oktober, terdiri dari Samarinda sebanyak 10 orang, Kutai Timur 8 orang, Kutai Kartanegara 7 orang, Paser sebanyak 5 orang, Berau 4 orang, Kutai Barat 4 orang, Penajam 4 orang,

dan Balikpapan 4 orang.

Diketahui, dugaan kematian ibu dikarenakan beberapa faktor, antara lain pendarahan 9,2 persen, eklamsia 10,2 persen, infeksi 3,7 persen, jantung 2,4 persen, gangguan darah 2,4 persen, tuberkulosis 1,2 persen, gangguan metabolisme 2,4 persen, serta ada beberapa belum diketahui penyebabnya.

Sedangkan untuk kematian bayi di Kaltim total sebanyak 302 orang, terdiri dari Samarinda 68 bayi, Kutai Kartanegara 67 bayi, Balikpapan 56 bayi, Kutai Timur 42 bayi, Berau 34 bayi, Bontang 23 bayi, Paser 19 bayi, Kutai Barat 15 bayi, PPU 7 bayi, dan Mahakam Ulu 3 bayi. **(ADV/nta)**

Pewarta : Ernit**Editor : Nicha Ratnasari**

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**DINAS KESEHATAN****GERMAS**
Germas Masyarakat
Hidup Sehat<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKOR PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si.
PS GUMBERSARI KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Bayi berat badan kurang 2,5 kilogram beresiko kesehatan dan kematian. (Istimewa)

PENYEBAB KEMATIAN BAYI AKIBAT MINIMNYA FASILITAS PERSALINAN YANG STERIL

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) membeberkan penyebab kematian ibu dan bayi yang kerap terjadi.

Kepala Dinkes Kaltim Dr Jaya Muallimin mengatakan, beberapa penyebab kematian bayi yang sering terjadi. Antara lain infeksi dapat disebabkan oleh tetanus, sepsis, pneumonia, dan diare. Infeksi tersebut sering terjadi di wilayah dengan kondisi minimnya fasilitas persalinan yang steril.

"Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilogram lebih berisiko mengalami masalah kesehatan dan kematian," kata Dr Jaya, Kamis (26/10/2023).

Kemudian, penyebab lainnya yakni adanya komplikasi neonatal, merupakan masalah yang terjadi pada bayi dalam 28 hari pertama kehidupannya. Komplikasi ini dapat meliputi asfiksia kelahiran, kelainan bawaannya, dan trauma kelahiran.

"Cidera, campak, malaria, kecelakaan, kekerasan, atau kelalaian juga dapat menjadi faktor menyebabkan kematian bayi," bebernya.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Jaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan ibu dan bayi dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai.

"Saya harap masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya kesehatan ibu dan bayi. Jangan sampai ada lagi ibu atau bayi yang meninggal karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah atau ditangani dengan baik," pungkasnya. **(ADV/nta)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari



Depo tempat penyimpanan Arsip DPKD Kaltim.

DPKD KALTIM SELAMATKAN ARSIP COVID-19 SEBAGAI CATATAN SEJARAH

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim akan melakukan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 Kaltim selama pandemi dari kurun waktu 2020 hingga 2023.

Arsiparis Ahli Muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Risnawati SE MM mengatakan, Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

"Karena ini arahan presiden langsung, dan dituangkan dari edaran menteri PANRB. Jadi kami akan mengkuaisisi arsip-arsip soal penanganan COVID-19 yang ada di seluruh Kaltim, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dan tahun ini kita sudah datang pemerintah kabupaten dan kota yang ada di kaltim terkait

hal ini," ungkapnya.

Tujuan Penyelamatan Arsip COVID-19 ini penting karena berkaitan dengan pengelolaan arsip khususnya, Penyelamatan Arsip COVID-19 pada semua pencipta arsip yakni OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dia menambahkan, pandemi merupakan peristiwa sangat langka, oleh sebab itu dua tahun kedepan, Pemerintah Pusat mengamankan kepada Pemprov Kaltim untuk mampu menghimpun arsip tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Sangat sayang kalau tidak didokumentasikan dengan baik, kita meninggalkan catatan sejarah bukan semata-mata dokumentasi saja tapi untuk menjadi pembelajaran baik bagaimana bangsa dan Kalimantan Timur mampu mengantarkan warganya selesai pandemi COVID-19. Ini akan menjadi cerita kedepan," ungkap Risnawati.

Risnawati mengkilas balik cerita mengenai pengalaman masyarakat dunia dalam menghadapi COVID-19. Di mana seluruh manusia diwajibkan menggunakan masker ketika di luar rumah, sekolah diliburkan dan belajar secara daring, para pekerja ban-

yak yang menjalankan sistem rolling dan kerja dari rumah atau Work From home (WFH) dan masyarakat dilarang berkumpul atau membuat kerumunan.

"Inikan sejarah bukan hanya di Kaltim, tapi juga dunia ya, bahkan saya pun alumni Covid ini, bagaimana saya harus dipisahkan dari keluarga. Tentu ini suatu yang berharga untuk kita arsipkan," jelasnya.

Bukan hanya soal nilai sejarahnya, penyelamatan arsip COVID-19 ini juga sebagai pertanggungjawaban pemerintah selama penanganan COVID-19.

"Secara akuntabel, pemerintah juga wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran COVID-19 kala itu," tutupnya.

Arsip COVID-19 yang akan diselamatkan adalah dimulai dari arsip tahun 2020 hingga arsip tahun 2023, dan penyelamatan arsip ini paling lambat harus selesai tahun 2026 mendatang.

"Tahun 2024-2025 kita target selesai untuk tingkat provinsi dan untuk tingkat kabupaten ditahun 2026," tutupnya. (ADV/Han/DPKD)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Arsiparis Ahli
Madya Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
(DPKD) Kaltim,
Risnawati SE MM

SETIAP OPD DIMINTA SIAPKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini masih kekurangan Arsiparis dalam mengelola arsip di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Pemprov Kaltim. Hal ini dikatakan oleh Arsiparis Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim, Risnawati kepada Mediakaltim.com pada Kamis (26/10/2023).

"SDM Arsiparis memang tidak menyeluruh OPD memiliki, saat ini cuma BKD dan BPKAD yang baru punyaz Arsiparis terbanyak adalah di DPKD," ungkapnya.

Seharusnya setiap OPD memiliki Arsiparis dalam mengelola kearsipan agar memudahkan dalam membuat recap arsip yang ada di OPD tersebut.

"OPD itu penting harus punya Arsiparis, seperti Arsiparis terampil dan Arsiparis ahli, jadi minimal 2 orang Arsiparis setiap OPD," tegas Rusminawati

Jika tidak memiliki Arsipar-

is, setiap OPD disarankan untuk memiliki petugas unit pengelola arsip, agar tidak terjadi penumpukan arsip. Ke depannya akan memudahkan pihak OPD itu sendiri jika mencari berkas.

"Kalau pun tidak memiliki arsiparis, pihak OPD harus punya petugas unit pengolah arsip, yang ada di bidang-bidang kantor tersebut, petugas ini tidak harus Arsiparis tapi dia bertugas untuk mengarsipkan setiap berkas," jelasnya.

"Untuk bisa menjadi Arsiparis saat ini sesuai peraturan minimal harus lulusan D3 kearsipan, jadi lulusan diluar kearsipan harus mengikuti pelatihan kearsipan," ungkapnya.

Arsip seharusnya itu dikelola di setiap OPD. Yang tugasnya, mengelola surat masuk surat keluar, harus diberkas dengan rapi dan dibuat recap dan daftar arsipnya. Hal ini akan memudahkan pihak OPD dalam pencarian berkas arsip jika diperlukan Kembali.

"Saya berharapnya sih arsip

itu terkelola di pencipta arsip, karena jika tidak ada melakukan kelola arsip, tidak melakukan penilaian arsip, maka kami pun bisa tidak punya arsip statis. Maka diharapkan pihak OPD terkait melakukan pengadaan tenaga kearsipan, tentunya harus berkompeten bidang kearsipan. Terkadang mereka (OPD) itu kesulitan dalam memberkaskan dan membuat daftar arsipnya," pungkasnya.

Diketahui, Definisi Arsiparis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. **(ADV/Han/DPKD)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



DISKES PPU FOKUS PENANGAN SEJAK DINI DAN PENCEGAHAN STUNTING



**PJ GUBERNUR KALTIM DAN
PANGDAM VI MULAWARMAN GALI
PERMASALAHAN PETANI DI PPU**



Kepala Diskes PPU, Jansje Grace Makirusat dalam kegiatan penyerahan makanan bergizi tambahan ke penderita stunting di Desa Labangka, Kamis (26/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

DISKES PPU FOKUS PENANGAN SEJAK DINI DAN PENCEGAHAN STUNTING

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus berfokus pada penanganan dan pencegahan kasus stunting di daerah. Melalui Dinas Kesehatan (Diskes) PPU, berfokus pada penanganan sejak dini dan pencegahan.

Kepala Diskes PPU, Jansje Grace Makirusat mengatakan dalam persoalan stunting ini pihaknya berfokus langsung melihat ke penyebabnya. Pertama adalah menyasar kepada remaja putri salah satunya dengan pemberian tablet tambah darah.

"Jadi Kami ada kegiatan di sekolah, namanya aksi bergizi yang kegiatannya meliputi olahraga, sarapan dan minum obat tambah darah secara bersama-sama dalam seminggu sekali selama 90 hari kepada remaja putri," kata dia di sela-sela penyerahan bantuan makanan bergizi tambahan di Desa Labangka, Kamis (26/10/2023).

Selain itu, pihaknya juga memiliki program pada calon pengantin. Selain edukasi reproduksi pihaknya juga telah memberikan masukan terkait ketika sang ibu sedang hamil.

"Terkait apa yang harus dilakukan dan se-

bagainya," sebutnya.

Selanjutnya bagi ibu hamil dan kurang gizi juga diintervensi dengan diberikan makanan tambahan. Dilanjutkan ketika kelahiran bayi dilakukan pengukuran dan penimbangan bayi dan jika ditemukan ciri-ciri stunting maka diberikan penanganannya.

"Jadi intervensi kami itu sejak remaja putri sampai bayi lahir hingga balita," jelas Grace.

Menurutnya, angka stunting di PPU saat ini sesungguhnya tidak tinggi. Hanya saja, memang belum dapat diketahui seutuhnya.

Karena hingga saat ini belum banyak bayi yang diukur dan baru dikisaran 60-70 persen yang telah melalui pengukuran. Setidaknya jika 90 persen bisa diukur, diperkirakan bisa mendapat gambaran stunting yang sebenarnya.

"Harapannya kepada keluarga untuk lebih memperhatikan gizi balita di keluarga masing-masing. Bahwa memberikan gizi sejak balita akan memberikan generasi yang baik bagi anak di masa mendatang," tutup Grace. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyerahkan bantuan makanan bergizi tambahan di Desa Labangka, Kamis (26/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU SALURKAN BANTUAN MAKANAN BERGIZI TAMBAHAN KE PENDERITA STUNTING

PPU - Penanganan stunting sudah menjadi prioritas nasional yang juga wajib menjadi konsentrasi pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyalurkan bantuan makanan bergizi.

Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun. Ia menyebutkan tujuan dari kegiatan ini salah satunya ialah untuk menekan angka stunting di Benuo Taka.

"Salah satu upaya untuk menekan stunting, maka diperlukan langkah konkret yang harus dilakukan sejak dini. Ketika pasangan akan menikah, ibu mengandung hingga melahirkan. Tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi," jelasnya, Kamis (26/10/2023).

Penyerahan bantuan gizi dan makanan tambahan pada sejumlah anak penderita stunting kali ini dilakukan di Desa Labangka, Kecamatan Babulu. Untuk diketahui, fak-

tor-faktor yang menjadi penyebab stunting bersumber dari persoalan nutrisi sebesar 30 persen.

Kemudian persoalan sanitasi sebesar 40 persen, faktor pola asuh orang tua sebesar 20 persen. Serta faktor yang lain adalah faktor keturunan sebesar 10 persen.

"Saya berharap yang utama bukan hanya mengobati dan memberikan asupan makanan bergizi. Tetapi bagaimana caranya kita mampu mencegah terjadinya stunting ini sejak dini," jelas Makmur.

Oleh karena itu, lanjutnya, pelayanan masyarakat terkait penyuluhan stunting ini wajib dilaksanakan. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa di masing-masing posyandu yang ada.

"Sehingga Kita harapkan tidak ada lagi istilah masyarakat tidak terlayani terkait stunting ini," pungkasnya. **(ADV/SBK)**



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat mendampingi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo di Agrowisata Sawah Gunung Mulia, Rabu (25/10/2023). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

PJ GUBERNUR KALTIM DAN PANGDAM VI MULAWARMAN GALI PERMASALAHAN PETANI DI PPU

PPU - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Tri Budi Utomo melakukan kunjungan kerja (kunker) lagi ke Penajam Paser Utara (PPU). Kali ini, yang menjadi lokasi kunjungan ialah destinasi Agrowisata Sawah Gunung Mulia Kecamatan Babulu, Rabu (25/10/2023).

Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyambut dan mengantarkan langsung kunjungan tersebut. Ia juga mengajak mereka untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan petani, di Kecamatan Babulu khususnya.

"Kami berharap kedepan masih banyak yang harus kita kerjakan bersama terkait keluhan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten PPU menyongsong pemindahan IKN (Ibu Kota Nusantara)," ucapnya.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan keahadirannya ini untuk mengidentifikasi persoalan yang dikeluhkan petani sawah PPU. Berkaitan dengan mempersiapkan daerah penyangga IKN sebagai wilayah penyokong pangan.

"Persoalan ini harus kita selesaikan bersama agar petani Kami sejahtera. Serta persediaan lumbung pangan kita tersedia dengan baik di Kaltim menjelang pemindahan IKN," terangnya.

Dari kunjungan ini, Akmal baru mengetahui ternyata yang menjadi persoalan mendasar adalah masalah pengairan. Sumber air yang ada mengalami pendangkalan.

Selain itu juga ada persoalan pasca panen, ketersediaan infrastruktur jalan tani. Kemudian juga persoalan kelangkaan pupuk serta mahal dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

"Dari itu, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanian diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi keluhan petani di Kecamatan Babulu Kabupaten PPU," tegasnya.

Pemprov Kaltim juga akan memberikan bantuan sebesar Rp 5,5 miliar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Berupa pompa air 140 unit, hand-sprayer/alat semprot pestisida 150 unit serta mesin panen padi sebanyak 8 unit.

"Akan diberikan diakhir bulan November sebagai bentuk untuk membangun petani dan ketahanan pangan yang lebih baik dimasa akan datang," tutur Akmal.

Sementara itu, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan kedatangannya di PPU juga untuk memastikan keamanan masyarakat PPU menjelang IKN. Pihaknya juga akan melakukan perbaikan di bidang infrastruktur pertanian agar beberapa permasalahan dapat terselesaikan.

"Wilayah kerja kami meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, namun kami konsen untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara," pungkasnya. **(ADV/SBK)**



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat berada di Desa tengin Baru, Kamis (26/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

MAKMUR TINJAU LANGSUNG PENILAIAN PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI DESA TENGIN BARU

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi berjalan lancarnya penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi 2023 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kamis (26/10/2023). Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kegiatan ini langsung dipantau Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

Program kerja Pembentukan Percontohan Desa Anti Korupsi ini telah berjalan sejak 2021 lalu. Pada 2023 ini, dilaksanakan di 22 desa se-Kaltim, termasuk Desa Tengin Baru yang ada di PPU.

Pada kegiatan ini, Tim KPK hadir sebagai tim penilaian Desa Anti Korupsi ini. Bersama dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta tim Penilai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen PDTT).

"Atas nama Pemkab PPU, Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penilai yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi PPU, terutama dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih dari tindak pidana korupsi," jelasnya.

Menurutnya, mewujudkan masyarakat yang

sejahtera di suatu daerah, diperlukan langkah-langkah dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah pemberantasan korupsi.

Perlu diketahui, bahwasannya dalam UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aturan ini menunjukkan bahwa, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.

Hal ini dikarenakan korupsi dapat berakibat secara signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Maka itu, Makmur mendukung adanya kegiatan ini.

Karena dengan adanya kegiatan penilaian ini, menjadi bekal tercipta sinergitas dalam penyelenggaraan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Utamanya bagi kepala desa, aparat desa, anggota BPD, pengurus BUMDes dan juga masyarakat.

"Besarnya harapan Kami dengan dilaksanakannya kegiatan ini, pengelolaan dana desa bisa semakin lebih transparan, akuntabel dan bebas dari tindak pidana korupsi, keberhasilan dan kesuksesan pembangunan desa merupakan ujung tombak bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten PPU," pungkash Makmur. (ADV/SBK)



Tim penilai dalam kegiatan penilaian percontohan Desa Anti Korupsi di Desa Tengin Baru, Kamis (26/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PENILAIAN DESA ANTI KORUPSI, DESA TENGIN BARU }PEROLEH PREDIKAT ISTIMEWA

PPU - Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) usai menjalani penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi 2023, Kamis (26/10/2023). Dalam program yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, Desa Tengin Baru memperoleh skor cukup baik, yakni 96,5.

Desa Tengin baru merupakan perwakilan dari 22 desa se-Kaltim. Pada kegiatan tersebut Pj Bupati PPU Marmur Marbun pada kegiatan ini hadir untuk langsung untuk memberikan semangat dan dorongan pada Pemdes Tengin Baru agar dapat meraih hasil maksimal.

Ia menyampaikan bahwa Desa Tengin Baru patut berbangga. Karena telah berhasil menjadi salah satu desa di PPU dan dipercaya menjadi pilot project sebagai Desa Anti Korupsi.

"Desa Tengin baru ini merupakan desa yang penuh inovasi dan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tinggal itu semua bersinergi," katanya.

Koordinator Tim KPK RI, Nur Cahyadi menyampaikan apresiasinya kepada tim penilai yang hadir untuk mendukung penilaian percontohan desa anti korupsi. Kemudian juga

pada Pemkab PPU yang telah memberikan dukungan dalam persiapan penyelenggaraan program ini.

"Ucapan terima kasih kepada Pj Bupati yang sudah menugaskan jajarannya kurang lebih tiga bulan. Serta kepala desa dan aparat desa yang sudah melengkapi lima komponen dan 18 indikator untuk penilaian," ungkapnya.

Disampaikan pula bahwa ada lima indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan Desa Anti Korupsi. Yakni penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Lebih lanjut, atas penilaian tersebut Desa Tengin Baru, berhasil meraih skor nilai sebesar 96,5 dengan predikat istimewa. Hasil ini merupakan hasil rekapitulasi dari seluruh tahapan penilaian yang dilakukan.

"Kelima indikator ini terbagi dalam 18 sub-indikator yang bentuk penilaiannya presentasi yang dilanjutkan tanya jawab, pengecekan dokumen fisik. Yang kemudian melakukan visit ke lokasi yang di pilih langsung, setelah itu nilainya diakumulasikan bersama seluruh penilai," pungkas Nur. (ADV/SBK)



INJAK USIA 5 TAHUN, PT MGRM DIHARAP MAMPU BERKEMBANG PESAT DAN BERKONTRIBUSI PADA PEMBANGUNAN KUKAR



**PEMKAB KUKAR GELAR
ACARA RAMAH TAMAH EVENT
PESODA I KALTIM**



Staf Ahli Bupati Kukar, Bidang Pemerintahan dan Kesra, Didi Ramyadi, saat menghadiri syukuran HUT ke-5 PT MGRM. (Istimewa)

INJAK USIA 5 TAHUN, PT MGRM DIHARAP MAMPU BERKEMBANG PESAT DAN BERKONTRIBUSI PADA PEMBANGUNAN KUKAR

TENGGARONG - Syukuran HUT ke-5 PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bidang Pemerintahan dan Kesra, Didi Ramyadi.

Didi Ramyadi turut menyampaikan sambutan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Tak lupa, ia juga menyampaikan ucapan selamat, atas perayaan hari jadi PT MGRM yang ke-5 tahun.

Didi turut mendoakan, agar seluruh jajaran manajemen PT MGRM bisa tetap solid. Serta membawa perusahaan daerah (perusda) tersebut sekalian berkembang, demi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kukar.

Untuk diketahui, PT MGRM merupakan perusda yang pada awal berdirinya dipercayakan untuk mengawasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kukar. Saat ini PT MGRM diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola secara khusus, Participating Interest 10% pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

"Jika sebelumnya nama baik PT MGRM pernah tercoreng karena oknum pengurusnya, maka dibawah kepemimpinan direktur yang baru, saya menaruh harapan besar bahwa PT MGRM menjadi pe-

rusahaan daerah yang turut menyumbangkan PAD bagi Kukar," katanya.

Didi berharap di usia yang ke-5 tahun ini, PT MGRM mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat Kukar. Sebagai upaya untuk mendukung Pemkab Kukar, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT MGRM juga diharapkan, bisa berkembang menjadi perusda yang tidak hanya berskala daerah. Tapi kedepannya mampu berkembang pesat dan melakukan ekspansi bisnis. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan lebih banyak.

"Mari bersama-sama kita bangun Kukar menjadi tempat yang aman, damai, sejahtera. Rakyatnya tentram dan bahagia karena semua kebutuhan dasarnya telah dapat dipenuhi oleh pemerintahnya. Fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia lengkap dan melayani dengan baik dan besar harapan saya PT MGRM menjadi kontributor dalam pencapaian hal tersebut," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Umum, Ahyani Fadianur Diani, saat menyampaikan sambutan Bupati Kukar di acara ramah tamah PESODA I Kaltim 2023. (Istimewa)

Pemkab Kukar Gelar Acara Ramah Tamah Event PESODA I Kaltim

TEGGARONG - Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Umum, Ahyani Fadianur Diani, turut menghadiri acara ramah tamah, Pekan Special Olympic Daerah (PE-SODA) I Kalimantan Timur (Kaltim) 2023 di Kukar. Digelar di Pendopo Odah Etam, Rabu (25/10/2023) malam.

Dalam kesempatan ini, Ahyani turut menyampaikan sambutan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Tak lupa ia mengucapkan selamat datang, kepada Ketua Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia (SOI) dan Ketua SOI Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, ajang ini merupakan wujud nyata pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang olahraga, tanpa adanya diskriminasi. Ajang yang digelar pada 25-27 Oktober di Tenggarong ini, mempertandingkan berbagai cabang olahraga yang diikuti para atlet berkebutuhan khusus.

Ia meyakini, lewat ajang ini akan menjadi bagian penting dari sistem pembinaan olahraga spesial khususnya. Sehingga kemudian bisa diproyeksikan untuk bisa mewakili daerah masing-masing dalam ajang olahraga di-

taraf yang lebih tinggi.

"Kita tentu berharap kegiatan ini dapat berlangsung baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama," kata Ahyani.

Lebih lanjut, Ahyani mengaku mengapresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan PESODA I Kaltim di Kukar. Ia juga berharap agar event olahraga semacam ini bisa terus diselenggarakan di Kukar.

Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, telah berkomitmen untuk mendedikasikan segala upaya, untuk mendukung sepenuhnya program pembinaan. Jug pengembangan olahraga di Kukar, tak terkecuali Olahraga Spesial.

"Insya Allah, komitmen dan dukungan ini akan terus kita lanjutkan hingga periode-periode mendatang. Dengan harapan, apa yang kita ikhtiarkan dan perjuangkan bersama, maka prestasi olahraga secara keseluruhan akan semakin meningkat," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Edotor : Muhammad Rafi'i



Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Distanak Kukar, Aji Gozali Rahman. (Istimewa)

Distanak Kukar Salurkan Ratusan Bibit Ternak pada Tahun 2023

TENGGARONG - Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar), sudah salurkan ratusan bibit ternak sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Distanak Kukar, Aji Gozali Rahman, pada Kamis (26/10/2023).

Aji Gozali Rahman mengatakan, bantuan bibit ternak yang dibagikan terdiri dari ternak sapi dan kambing. Pemberian bantuan ternak ini merupakan upaya Distanak Kukar untuk meningkatkan kualitas dan populasi ternak di Kukar.

"Salah satu cara adalah dengan mengimpor ternak dengan bibit unggul dari luar daerah," kata Aji Gozali.

Sejauh ini, Kukar masih sangat bergantung pada pasokan daging dari daerah lain. Sehingga Distanak Kukar sengaja mengambil bibit dengan kualitas unggulan dari daerah lain untuk dikembangkan di Kukar.

Rencananya, kata Aji Gozali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar akan memak-simalkan lahan bekas tambang sebagai lo-

kasi peternakan sapi. Termasuk mencoba mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit sebagai wilayah peternakan.

"Pemerintah juga telah memberikan sejumlah bantuan bagi peternak. Bantuan tersebut mencakup kandang ternak dan bibit-bibit ternak berbagai jenis," terangnya.

Kelompok ternak di Kukar, telah menerima sejumlah bantuan bibit ternak dari Distanak Kukar. Ada sekitar 115 bibit kambing yang dibagikan ke 4 kelompok ternak di tiga kecamatan berbeda. Dua kelompok ternak di Kecamatan Marangkayu, satu kelompok ternak di Tenggarong, dan satu kelompok ternak di Anggana.

Selain kelompok yang menerima 115 bibit kambing tersebut, juga masih ada beberapa kelompok peternak yang menerima bantuan lain, seperti bantuan kandang ternak. "Kita berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi para peternak dan juga bisa meningkatkan populasi ternak di Kukar," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kades Teluk Dalam, Supian. (Ady/Radar Kukar)

Desa Teluk Dalam Bakal Punya Kantor Desa Baru

TENGGARONG - Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggara Seberang, akan segera membangun kantor desa baru. Rencananya akan dibangun di seputar kawasan eks jembatan gantung, arah menuju RSUD AM Parikesit Tenggara Seberang, Kamis (26/10/2023).

Kepala Desa (Kades) Tekuk Dalam, Supian, mengatakan rencana pembangunan kantor desa baru ini sudah ada sejak lama. Hanya saja baru dapat terealisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.

"Tahun ini kita realisasikan di anggaran perubahan. Itu ini lainnya

Rp 1,5 miliar yang dibantu APBD, tapi ini masih tahap perencanaan dan langsung dibangun," katanya.

Ia menargetkan, pembangunan gedung kantor desa yang baru ini, bisa rampung pada akhir tahun 2024 mendatang. Supian juga berharap, dengan pemindahan kantor desa ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi.

"Harapan kami kedepan supaya mempermudah masyarakat mengurus. Karena memang saat ini kantor desa kita tempat di terpojok di dalam," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



PEMASANGAN REKLAME CALEG RESMI DIBUKA 25 NOVEMBER 2023 MENDATANG

BACA HALAMAN A2

a



**RSUD BONTANG DIKUCUR ANGGARAN
RP 46 MILYAR, PEMBELIAN ALAT
KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN SDM**



Ilustrasi reklame caleg. (ist)

Pemasangan Reklame Caleg Resmi Dibuka 25 November 2023 Mendatang

BONTANG - Pemasangan reklame resmi dibuka untuk Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (caleg) per tanggal 25 November 2023 mendatang. Namun begitu, sejak 2 bulan lalu sudah mulai banyak parpol yang mendaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) Bontang.

Fidia, Customer Service DPMPSTSP Bontang tidak bisa memastikan, sudah berapa banyak yang mengajukan berkas untuk pemasangan reklame.

Walaupun pemasangan resmi masih November mendatang, banyak parpol yang sudah memasang reklame. Hal tersebut sah-sah saja, namun reklamennya diberi batasan hanya 10 hari pemasangan.

Adapun persyaratannya harus ada rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-pol). Untuk pemberkasan dilakukan di DPMPSTSP,

kemudian dilanjutkan ke Kesbangpol untuk dilakukan pengecekan apakah boleh terbit atau tidak.

Syarat penerbitan reklame membutuhkan KTP Caleg atau penanggung jawab, NPWP, lokasi pemasangan reklame dimana saja, foto reklame, dan surat kesediaan membayar pajak.

"Untuk biaya pemasangan itu ada, cuma pembayarannya di Bapenda, pembayaran bisa berbeda-beda tergantung banyak dan lama pemasangan," katanya.

Sebelum 25 November, pemasangan dibatasi hanya 10 hari, jika masih ada yang terpasang lebih dari itu maka akan dicabut oleh Satpol PP.

"Kalau sudah tanggal 25 November, mereka bisa pasang lebih lama, sampai nanti hari pemilu juga bisa, tapi rata-rata mereka ambil jangka pemasangan sedikit-sedikit, tapi tetap akan diperpanjang," tutupnya.

(sya/adv)



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Ilustrasi. (ist)

Berikut Langkah-Langkah Mengurus NIB di DPMPTSP!

BONTANG – Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) cukup mudah. Bisa langsung datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), atau jika tidak ingin repot bisa melalui cara online.

NIB dibagi menjadi dua yakni NIB perorangan dan NIB badan usaha. NIB perorangan cukup membutuhkan KTP orang tersebut serta email atau nomor Whatsapp yang aktif.

"15 sampai 20 menit sudah bisa terbit asal berkas lengkap," jelas Fidia, Customer Service DPMPTSP Bontang saat diwawancara redaksi, Kamis (26/10/23).

Sementara itu, untuk NIB badan usaha bisa menyiapkan KTP, NPWP direktur, dan perusahaan, e-mail, SK Kementerian dan

akta dari notaris.

"Badan usaha itu seperti CV, PT, yang seperti itu, pengurusan di kami bisa langsung jadi juga asal berkas lengkap pasti hari itu juga langsung jadi," ujarnya.

Untuk pengurusan bisa langsung dilakukan mandiri secara online, atau ke pelayanan DPMPTSP jika ada hal yang kurang dimengerti. Untuk online tentu menggunakan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

"Tanpa ke PTSP juga sudah bisa terbit, karena rata-rata yang datang langsung ke sini biasanya dia belum menguasai OSS-RBA itu, nanti kami akan arahkan," tutupnya. **(sya/adv)**



Ilustrasi flu singapura. (ist)

Gejala dan Cara Pengobatan Flu Singapura pada Anak

BONTANG - Flu Singapura pada anak merupakan gejala ringan yang akan sembuh dengan sendirinya. Penyakit ini lebih sering menyerang pada anak-anak maupun balita. Namun, orang dewasa pun juga bisa terkena penyakit ini, meski sangat jarang terjadi.

Hal itu dipaparkan oleh Dokter Spesialis Anak di RSUD Taman Husada, dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A.

Ia menjelaskan, jika anak-anak lebih rentan terkena Flu Singapura, hal ini karena daya tahan tubuh anak yang belum sekuat orang dewasa.

"Gejalanya Flu Singapura ini pun terdiri dari demam. Biasa maksimal demam sampai tiga hari. Setelah itu diikuti dengan tumbuhnya ruam dan juga gatal-gatal yang mirip dengan cacar air," bebernya saat diwawancarai awak media Radarbontang.com, Selasa (24/10/2023), kemarin.

Biasanya, saat anak mengalami Flu Singapura ini terjadi di area sekitar mulut, tangan, kaki, pantat, telapak tangan, telapak kaki, sikut, dan lutut. Bahkan, muncul juga di area kemaluan.

"Khasnya Flu Singapura ini adalah dengan adanya

luka yang hampir mirip dengan sariawan di rongga mulut. Bisa di tenggorokan dalam, lidah, bibir, bahkan pipi dalam," paparnya.

Untuk pengobatan yang diperlukan saat anak mengalami Flu Singapura ini contohnya seperti demam, yang akan diberi obat penurun panas. Jika sariawan akan diberi olesan atau disemprotkan untuk membuat sariawan berkurang.

"Karena biasanya anak kecil kendalanya tidak mau makan saat mengalami sariawan. Untuk gejala ruam bisa diberi saleb khusus yang dioleskan pada kaki, tangan, lutut, atau sikut yang terkena bintik merah dan terdapat berisi air," paparnya.

Saat mengalami Flu Singapura ini, dalam masa penyembuhan selama 10 hari lamanya, jika luka dibuka atau mengelupas bisa membuat luka membekas.

"Untuk orang tua biasanya khawatir pada anak yang tidak mau makan, tidak kebayang gimana jadinya jika banyak sariawan di dalam rongga mulut anak. Untuk anak di bawah dua tahun, dan yang makannya masih banyak drama lebih baik dikasih makan yang lembut dan dingin, yang nyaman untuk ditelan," tutupnya. **(dwi/adv)**



Ruang Cempaka RSUD Taman Husada Bontang, ruangan khusus perawatan rawat inap anak (dwi).

Mengenal Lebih Dekat Dokter Spesialis Anak di RSUD Bontang

BONTANG - Kebutuhan medis antara anak-anak dengan orang dewasa sangat berbeda, itulah sebabnya dibutuhkan seorang dokter spesialis anak untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang anak sedang alami.

Dokter spesialis anak adalah dokter yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa, hingga merawat kesehatan anak, dari fisik, mental, maupun sosial.

Dokter Spesialis Anak di RSUD Taman Husada, dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, menjelaskan, untuk dokter spesialis anak menangani mulai usia 0 sampai 18 tahun.

"Jika sudah 18 ke atas sudah diharuskan untuk ke dokter penyakit dalam," paparnya, Selasa (24/10/2023).

Dokter spesialis anak menangani operasi yang tidak ada tindakan, seperti jika ada yang melahirkan dengan cara sesar, maka tugas dokter spesialis anak menerima bayi tersebut.

"Kami yang menolong bayinya, bayi yang memerlukan pertolongan di awal kehidupannya, pasti yang paling utama adalah dengan memanggil kami," ucapnya.

Ditambahkannya, untuk dokter spesialis anak yang paling sering ditangani adalah gejala batuk pilek. Sementara itu, penyakit anak itu ada banyak sekali, tidak hanya sekedar batuk pilek saja, akan tetapi ada juga seperti paru, jantung anak, pencernaan, kegawatan, masuk Intensive Care Unit (ICU) anak yang disebut Pediatric Intensive Care Unit (PICU). (dwi/adv)



Ruang Anggrek RSUD Taman Husada Bontang khusus pasien isolasi. (Yahya Yabo)

Ruang Anggrek RSUD Bontang Khusus Pasien Isolasi, Penjenguk Diharapkan Tertib Aturan

BONTANG – Ruang Anggrek di RSUD Taman Husada Bontang dikhususkan bagi pasien isolasi seperti perawatan kasus airborne disease yang meliputi penyakit TB, TB MDR, Covid-19, SARS, MERS dan Pneumonia MRSA.

Kepala Ruang Anggrek RSUD Bontang, Ria Kusuma Dewi mengatakan, bahwa ruang anggrek dikhususkan bagi pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit yang dapat menular melalui udara dan pasien terbanyak adalah TB (Tuberculosis).

Ria menambahkan, ruang anggrek sendiri memiliki kapasitas sebanyak 16 tempat tidur yang terdiri dari ruang isolasi ICU bertekanan negatif sebanyak 4 tempat tidur, dan ruang isolasi non ICU bertekanan negatif sebanyak 12 tempat tidur.

Fasilitas di ruang anggrek pada setiap kamar terdapat 1 bed electric, dilengkapi dengan bed monitor, televisi, meja, kursi dan kamar mandi pasien. Selain di ruang ICU Isolasinya dilengkapi dengan dukungan alat – alat canggih seperti ventilator, HFNC, mesin suctioning, defibrillator, alkes emergency dan drug emergency yang selalu siap digunakan sesuai

dengan kebutuhan dan juga didukung oleh tenaga ahli profesional di bidangnya.

Ia menambahkan, pasien pada ruang anggrek seharusnya tidak diperkenankan dijenguk, untuk mengurangi tingkat penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui udara dari percikan dahak pasien.

“Untuk pasien TBC dengan perawatan isolasi di ruang anggrek, pasien tidak diperkenankan untuk dijenguk. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih banyak pengunjung/masyarakat yang belum mengetahui. Untuk itu diharapkan mulai dari sekarang informasi edukasi tentang tata tertib ruang anggrek dapat dipatuhi masyarakat,” harapnya.

Ria menambahkan, dengan mematuhi aturan di Ruang Anggrek RSUD Taman Husada Kota Bontang dapat mewujudkan tujuan yakni aman pasien, aman keluarga, aman petugas.

“Sehingga apa yang menjadi tujuan kami aman pasien, aman keluarga dan aman petugas dari penyakit menular dapat terwujud,” tandasnya. (adv/yah)



Direktur RSUD Taman Husada, dr. Suhardi, Sp.JP saat menjelaskan pemenuhan alat kesehatan. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

RSUD Bontang Dikucur Anggaran Rp 46 Milyar, Pembelian Alat Kesehatan dan Pengembangan SDM

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang mendapatkan anggaran sebesar Rp 46 Milyar untuk pembelian alat kesehatan, hingga untuk kebutuhan pengembangan SDM Rumah Sakit.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP menjelaskan, anggaran ini diperoleh dari anggaran perubahan tahun 2023, di mana anggaran akan diperuntukkan untuk pemenuhan alat-alat kesehatan di RSUD Bontang dan pengembangan SDM.

"Untuk saat ini RSUD mendapatkan anggaran yang sebagian besar untuk pengadaan alat kesehatan," kata dr. Suhardi, Sp.JP saat ditemui.

Lanjut, dr. Suhardi mengatakan, bahwa alat kesehatan yang telah direncanakan pengadaannya seperti alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk RSUD Bontang.

"Beberapa memang rencana kami untuk pemenuhan alat kesehatan. Termasuk yang besar pengadaan alat MRI. Ini hanya beberapa rumah sakit yang punya di Kaltim, RSUD Bontang termasuk yang akan punya," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan anggaran juga digunakan dalam penunjang alat kesehatan lainnya dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ditambahkannya, kebutuhan SDM tenaga ke-dokteran spesialis telah memenuhi beberapa SDM.

"Kami sudah mulai banyak tenaga spesialis. Ke depan akan semakin komplit. Karena kami harap RSUD Bontang akan menjadi pelayanan masyarakat dan menjadi rujukan bagi daerah di luar Kota Bontang. Karena akan semakin lengkapnya SDM dokter dan sarana dan prasarana," ungkapnya. (adv/yah)



JANGAN ADA TOLERANSI TERHADAP PELAKU PELECAHAN



**CEGAH KASUS BULLYING, PERLU
KETERLIBATAN SELURUH PIHAK**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

JANGAN ADA TOLERANSI TERHADAP PELAKU PELECAHAN

TANJUNG REDEB - Adanya dugaan pelecehan di lingkungan pemerintah disorot tajam Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dia mengaku sudah mendengar kabar tersebut belum lama ini.

Dirinya menegaskan, jangan sampai ada toleransi yang diberikan terhadap pelaku pelecehan tersebut. "Pimpinannya harus tindak tegas, jangan sampai hal seperti ini dibiarkan karena akan merusak citra ASN dan instansi itu sendiri," ungkapnya.

Madri menduga tindakan pelecehan tersebut tak hanya satu kali dilakukan pelaku terhadap bawahannya. Dirinya pun mengaku sangat geram, karena tidak ada sanksi berarti yang diberikan kepada pelaku.

"Kabarnya korban sudah melapor langsung kepada kepala OPD, tapi respons yang didapatkan tidak

memuaskan dan tidak ada solusi. Padahal pimpinan OPD adalah orang yang paling bertanggungjawab jika ada kejadian-kejadian seperti ini khususnya di lingkungan instansinya," katanya.

Meski demikian, Madri tetap mengimbau kepada seluruh ASN yang mengalami hal serupa untuk tidak takut melaporkan jika ada kejadian tidak menyenangkan, terkhusus jika ada dugaan tindak pelecehan yang berujung membuat suasana bekerja menjadi tertekan serta tidak nyaman.

"Harus berani melaporkan dan untuk kepala OPD juga harus bisa mengambil tindakan tegas bagi para pelaku pelecehan di lingkungan kerja, jangan sampai hal seperti ini dianggap biasa. Jadi harus ada sanksi yang benar-benar membuat jera para pelaku," pungkasnya. **(adv/dez)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

HARAP PEMERINTAH MELEGALKAN MANUSIA PERAHU YANG TELAH MENETAP LAMA DI BERAU

TANJUNG REDEB - Adanya manusia perahu yang telah menetap lama di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan diharapkan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah dilegalkan.

Ia menuturkan, manusia perahu yang sudah menetap lama sudah ada yang menjalin hubungan pernikahan, bahkan menetap bersama masyarakat lokal.

"Sehingga harus ada kejelasan mengenai status kewarganegaraannya. Mereka juga butuh perhatian sosial dari kita," ungkapnya.

Menurutnya, ketidakjelasan status manusia perahu itu akan ber-

dampak terhadap nasib anak-anak mereka ke depannya. "Kita harus perlakukan mereka secara manusiawi," tegasnya.

Kendati demikian, politikus Golkar ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melegalkan manusia perahu yang telah lama berbaur dengan masyarakat, tentunya diiringi dengan mencegah masukan kembali manusia perahu ke Bumi Batiwakkal.

"Saya berharap ada pendataan yang dilakukan, agar bisa diketahui berapa jumlah mereka dan dicarikan solusi yang baik dan manusiawi untuk mereka," tandasnya. (adv/dez)



Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari.

DORONG PEMERINTAH TINGKATKAN SDM BIDANH KESEHATAN DAN PENDIDIKAN YANG ADA DI PERKAMPUNGAN

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diharapkan serius meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan pendidikan yang ada di setiap kampung.

Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari menuturkan, tenaga kesehatan dan pendidikan yang ada di wilayah perkampungan Bumi Batiwakkal harus diberi pelatihan.

"Supaya peningkatan SDM di kedua bidang tersebut dapat terrealisasi, apalagi hal itu juga merupakan program kepala daerah kita," ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan SDM

tersebut akan bermuara kepada pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Terlebih sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam kemajuan suatu daerah.

Sri Kumalasari berharap, peningkatan di sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan ini bisa terus menjadi perhatian Pemkab Berau. Kata dia, peningkatan juga harus dilakukan merata di seluruh wilayah.

"Kita mengharapkan Pemkab Berau bisa lebih memberikan perhatiannya, khususnya bagi kampung yang memang membutuhkan," tandasnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

CEGAH KASUS BULLYING, PERLU KETERLIBATAN SELURUH PIHAK

TANJUNG REDEB - Masih maraknya kasus bullying atau perundungan yang terjadi mendapat perhatian serius oleh Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Ia menilai, agar kasus tersebut dapat dicegah, perlu melibatkan semua pihak. "Harus jadi perhatian serius, karena berdampak buruk terhadap korban," ungkapnya.

Dirinya menyebut, tak sedikit korban yang berujung pada kematian akibat perundungan. Bagi pelaku juga bisa berakibat buruk, mulai dari gangguan mental, merusak karakter dan kecerdasan.

"Lembaga pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari perilaku ini, karena bullying bukan hanya tanggung

jawab guru saja melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," terangnya.

Upaya konkret untuk pencegahan perundungan, sebutnya, adalah pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak.

Pun begitu dengan guru di lingkungan sekolah, harus bisa menjadi orang tua kedua yang membimbing anak. Bila tidak, maka perilaku perundungan akan menjadi watak hingga dewasa dan merugikan lingkungan sekitar.

"Dengan perbaikan akhlak siswa dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus bullying dapat diminimalisir dan akhirnya dihapuskan dari lingkungan pendidikan," tutupnya. (adv/dez)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Reses Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ihsan Rapi.

DRAINASE DAN LPJU JADI PRIORITAS ICHSAN

TANJUNG REDEB - Belum lama ini Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ihsan Rapi melaksanakan reses di Gang Nyiur Gading, Jalan Durian III, Kecamatan Tanjung Redeb.

Dalam reses tersebut, Ihsan mengaku aspirasi yang disampaikan masyarakat masih mengenai minimnya drainase dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

"Drainase itu dikeluhkan karena saat hujan deras sering terjadi genangan, selain itu mengenai LPJU karena ada beberapa kawasan yang masih minim penerangan," jelasnya.

Dirinya menambahkan, masalah drainase dan PJU menjadi prioritas dalam agenda tugasnya sebagai anggota DPRD Berau. Ihsan pun berkomitmen untuk mengupayakan pembenahan serta peningkatan infrastruktural drainase.

tur drainase.

"Aspirasi ini akan kami sampaikan ke instansi terkait. Supaya bisa jadi prioritas," ujarnya.

Khusus untuk lampu LPJU, lanjutnya, sejauh ini dirinya telah mengakomodir ratusan titik lampu jalan di wilayah Tanjung Redeb.

Dipaparkannya, ada sebanyak 430 titik sudah terpasang di beberapa tempat. Ditambah, pada tahun ini telah terealisasi sebanyak 120 titik yang telah terpasang.

"Jadi total pemasangan tiang lampu PJU sampai saat ini sekitar 550 titik. Ini akan terus kami upayakan, supaya wilayah yang masih butuh penerangan jalan dapat terakomodir," tandasnya. (adv/dez)



BEGINI KRONOLOGI TRUK NAHAS SERUDUK 5 MOBIL DAN MOTOR DI MUARA RPAK



**PT FORTUNA READYMIX SIAP TANGGUNG
JAWAB, KECELAKAAN TRUK CONCRETE
PUMP DI MUARA RPAK**



Kecelakaan lalulintas di kawasan Muara Rapak, Kilometer 1 Jalan Soekarno Hatta pada Kamis (26/10).

BEGINI KRONOLOGI TRUK NAHAS SERUDUK 5 MOBIL DAN MOTOR DI MUARA RAPAK

BALIKPAPAN - Satu orang dilarikan ke klinik Ibnu Sina dan terpaksa dirujuk ke RSUD Beriman Gunung Malang usai mengalami kecelakaan lalu lintas di Muara Rapak, Km 1 Jalan Soekarno Hatta pada Kamis (26/10/2023) sekitar pukul 10.00 Wita.

Adapun kronologi kejadian, bermula dari sebuah truk Concrete Pump atau penembak semen dengan nopol KT 8370 LQ melaju dari arah Km 2 hendak menuju simpang lampu merah Muara Rapak. Namum, sesampainya di turunan Muara Rapak, truk tersebut mengalami rem blong dan langsung menabrak sebuah mobil pick up KT 8571 LJ.

"Habis itu dia nabrak lagi Avanza hitam nopol KT 1927 LZ dan sepeda motor nopol KT4518 KE. Sampai terseret di bawah mobil Avanza hitam itu," ujar salah seorang saksi, Daeng Talib di lokasi kejadian.

Lebih lanjut Daeng Talib menjelaskan, bahwa tak sampai di situ saja, truk naas tersebut menabrak kendaraan yang melintas, dua mobil lainnya yakni Daihatsu Siga nopol KT 1704 BU dan angkot dengan nopol KT 1586 KU juga turut ditabrak.

"Habis itu ada angkot merah sama mobil silver dihantam juga sama truk ini," jelasnya.

Saksi lainnya, Amir menyebutkan jika sebelum kejadian truk penembak semen tersebut melaju kencang. Bahkan warga yang melihat seperti ugal-ugalan.

"Laju dari arah kilo. Sampai sini langsung

kedengaran suara tabrakannya," tambahnya.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiyan yang tiba di lokasi kejadian pun langsung mengambil langkah untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

"Jadi setelah didata yang terlibat ini ada 5 mobil dan satu sepeda motor ya. Sementara ini personel juga masih melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan menanyakan keterangan saksi-saksi," ujarnya.

Sopir truk nahas tersebut pun telah diamankan oleh kepolisian, guna pemeriksaan lebih lanjut perihal surat-surat izin berkendaraannya hingga surat-surat kendaraannya.

"Sopir sudah kita amankan. Nanti setelah ini kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor," jelas Kasat Lantas.

Ropiani membenarkan jika kendaraan truk dari arah Km 2 hendak menuju persimpangan Muara Rapak diduga mengalami gagal pengereman. Ini terlihat dari jalan aspal yang tidak ada tanda-tanda gesekan ban.

"Dugaanya sih begitu, tapi nanti kita periksa lebih jauh ya. Kondisi jalan di sini juga hampir sama dengan turunan simpang Muara Rapak, terjal. Faktor itu bisa mempengaruhi gagal rem," tambahnya.

Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan telah diderek ke Makopolresta Balikpapan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Truk nahas penyebab kecelakaan di Muara Rapak, Kilometer 1,5 Jalan Soekarno Hatta milik PT Fortuna Readymix.

PT FORTUNA READYMIX SIAP TANGGUNG JAWAB, KECELAKAAN TRUK CONCRETE PUMP DI MUARA RAPAK

BALIKPAPAN - Truk Concrete Pump atau truk pemompa semen beton dengan nopol KT 8370 LQ yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di kawasan Muara Rapak, Balikpapan Utara pada Kamis (26/10/2023) pagi sekitar pukul 10.00 Wita adalah milik PT Fortuna Redymix.

Direktur Utama PT Fortuna Redymix, Ira Febriana mengatakan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Bahkan saat kejadian terdapat seorang korban pengendara sepeda motor. Pihaknya langsung membawanya ke Klinik Ibnu Sina dan dirujuk ke RSUD Beriman di kawasan Gunung Malang.

"Pertama saya atas nama perusahaan meminta maaf atas kejadian di Muara Rapak, Km 1,5 tersebut. Khususnya kepada para korban. Untuk korban sepeda motor sudah kita urus tadi pengobatannya sampai selesai," ujarnya saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut Ira menjelaskan, untuk korban bernama Nasrullah (21) saat ini sudah berada di rumahnya, setelah sempat mendapat perawatan medis di bagian tangannya.

"Korban tadi dirujuk ke RS Gunung Malang ya, sempat mendapat jahitan di bagian tangannya. Tapi sudah kami antar ke rumahnya, di kawasan Km 20," jelasnya.

Sementara itu untuk truk pemompa semen beton yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut, ia mengaku sangat laik. Bahkan

seluruh sopir yang membawa truk milik PT Fortuna Redymix, setiap pagi melakukan briefing untuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

"Kita pastikan semua laik. Baik itu KIR dan lain-lainnya. Karena setiap pagi kita selalu ada briefing kepada seluruh sopir yang membawa truk-truk kami," tambahnya.

Bahkan sopir truk nahas, bernama Samsudin pun disebutkan bukan sopir baru. Melainkan memiliki pengalaman telah membawa truk besar.

"Sopir kita pastikan sudah berpengalaman. Sudah kerja di kami sudah cukup lama. Dan paham dengan unit (truk) tersebut," tehas Ira.

Atas kejadian ini pula, sementara waktu kegiatan PT Fortuna Redymix berhenti operasional. Hal ini guna mempertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kecelakaan, termasuk dengan pihak kepolisian.

"Kami siap bertanggungjawab kepada semua korban, termasuk kendaraan yang terlibat tadi. Kami juga akan kooperatif terhadap pihak kepolisian," tutupnya.

Seperti diketahui, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar milik PT Fortuna Redymix bukan kali ini saja. Pada Desember 2022 lalu kecelakaan di simpang Muara Rapak yang melibatkan truk molen dengan korban meninggal dunia juga dialami PT Fortuna Readymix.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI JUMAT
27 OKT 2023



RELOKASI PEDAGANG PASER, KOMISI III DPRD PASER USUL BENTUK TIM KHUSUS

**KONTRAKTOR SIAP TINDAKLANJUTI
KELUHAN PEDAGANG WISKUL**





Kios baru Pasar Induk Penyembolum Senaken

RELOKASI PEDAGANG PASER, KOMISI III DPRD PASER USUL BENTUK TIM KHUSUS

PASER - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mengusulkan, agar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Paser membentuk tim khusus untuk relokasi pedagang.

Hal itu disuarakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansur, dalam menyikapi persoalan pedagang di Pasar Induk Penyembolum Senaken. Pasalnya, masalah demi masalah kian timbul jelang relokasi pedagang.

"Jika relokasi terus menimbulkan masalah dan tidak selesai-selesai, kami sarankan Disperindagkop segera bentuk tim khusus," kata Basri.

Ia mengatakan, salah satu permasalahan dalam relokasi itu yakni adanya kecurangan jual beli kios. Hal ini seiring akan dilakukannya pemindahan pedagang ke bangunan baru.

"Kita menjaga jangan sampai peristiwa jual beli kios masih terulang kembali," katanya.

Selain pembentukan tim khusus, Basri menuturkan, Disperindagkop UKM Kabu-

paten Paser juga harus transparan dalam mendata dan memverifikasi pedagang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada.

"Pedagang yang sudah mendapatkan petak atau kios hendaknya diumumkan kepada semua pedagang sehingga tidak menimbulkan salah paham," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Paser, Yusuf menjelaskan, total kios yang telah tersedia berjumlah 104, sebanyak 50 kios telah dihuni oleh pedagang korban kebakaran yang telah lulus verifikasi.

"Pada tahun lalu sudah dibangun 104 kios, sedangkan pada tahun ini direncanakan ada 117 kios," katanya.

Yusuf menegaskan semua pedagang baik itu korban kebakaran pada 2018 maupun pedagang di pasar penampungan akan diakomodir secara bertahap melalui tahapan - tahapan verifikasi sehingga dipastikan telah transparan.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KONTRAKTOR SIAP TINDAKLANJUTI KELUHAN PEDAGANG WISKUL

PASER - Kontraktor pembangunan Kawasan Wisata Kuliner (Wiskul) Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot turut angkat bicara menyikapi keluhan pedagang setempat atas kerusakan booth kontainer.

Sejatinya, Wiskul Sungai Tuak, yang baru diresmikan pada Maret 2023 lalu itu, disebut sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diterima pelaksana kegiatan. Sehingga menurutnya, tidak ada ketidaksesuaian yang dilakukan saat pengerjaan.

"Kalau berdasarkan RAB saat kami terima untuk dikerjakan memang lantai atas kontainer yang bertingkat itu keterangannya menggunakan plywood," kata Kontraktor, Khairul, saat ditemui.

Untuk diketahui, sebulan setelah diresmikan atau sejak April 2023 lalu, booth kontainer telah banyak kerusakan. Antara lain, seperti tempias air hujan, bagian atap yang berbahan plywood mulai hancur atau rusak.

Kondisi ini membuat pedagang khawatir. Dari 60 booth kontainer, 40 di antaranya bertingkat atau dua lantai. Menanggapi hal itu, pihaknya siap melakukan perbaikan meski tidak disediakan anggarannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

"Kalaupun perlu diperbaiki kita siap memperbaikinya," tegasnya.

Khairul menjelaskan, pembangunan kawasan yang menelan Rp 4,5 miliar itu sempat mengalami keterlambatan pengerjaan hingga 15 hari. Hal itu diakibatkan akses pengangkutan material yang terhambat karena ada perbaikan jembatan kala itu.

Kendati begitu, ia menjamin bahwa konstruksi bangunan tetap sesuai dengan perencanaan. Adapun menyikapi keluhan pedagang, akan ditindaklanjuti sebagai bentuk kepedulian sesama terhadap Wiskul Sungai Tuak.

"Inisiatif dari kami nanti untuk perbaikannya. Karena kita sama-sama ingin lihat wiskul ini baik



Booth kontainer di Kawasan Wisata Kuliner Sungai Tuak butuh perbaikan.

ke depannya," sebutnya

Sebelumnya, salah seorang pedagang, mengeluhkan kondisi bangunan booth kontainer yang mengalami kerusakan. Meski belum ada korban, namun hal itu diminta untuk disikapi, seperti perbaikan lantai atap yang beralaskan plywood.

"Kami khawatir bagaimana jika kerusakan semakin parah dan akan ini akan semakin tidak membuat nyaman pembeli," ucap Ketua Paguyuban Pedagang Wiskul Sungai Tuak, Zulkifli, Selasa (24/10/2023) malam.

Khusus bagian atap booth kontainer yang berbahan plywood mulai bolong-bolong. Sementara di lantai 2 disediakan tempat duduk dan meja untuk pembeli. Namun kondisi yang ada sekarang ini dikatakannya sangat riskan dan mengkhawatirkan.

"Plywood ini mau sampai kapan bertahannya. Sudah menahan panas dan hujan serta orang duduk di atasnya," sambungnya.

Sejatinya persoalan itu pernah disampaikan ke Disporapar yang awalnya secara lisan. Dikatakannya, penjual takut berjualan dengan kondisi kerusakan yang terdapat di booth kontainer berukuran 3x6 meter itu.

Karena tidak ada tindak lanjut dari penyampaian secara lisan untuk diperbaiki, pedagang kemu-

dian bersurat yang ditujukan ke bupati Paser, DPRD Paser dan Disporapar. Alhasil dilakukan pertemuan, namun upaya itu juga tak membuahkan hasil seperti harapan pedagang.

"Kalau memang kami menganggap ini enggak kritis, kami tak segetol ini untuk dilakukan pertemuan saat itu. Ya, katanya mau diperbaiki cuma sampai sekarang tidak ada realisasinya," keluh Zulkifli.

Karena tak ada tanda-tanda diperbaiki, tak ingin terjadi kerusakan di booth kontainer yang lebih parah, pedagang terpaksa mengeluarkan duit pribadi untuk melakukan perbaikan. Nominalnya bervariasi berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu.

"Kalau ini (booth kontainer) rusak parah dan ada insiden siapa yang tanggung jawab. Jangan sampai ada korban baru diperbaiki," ketusnya.

Padahal kata Zulkifli, pedagang yang berjualan setiap bulannya membayar retribusi yang disetorkan kepada pengelola Kawasan Wiskul Sungai Tuak. Nominalnya Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu.

"Kalau kontainer dua lantai retribusinya Rp 600 ribu per bulan. Jadi kami minta ini dapat diperbaiki," tegas Zulkifli.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Sekda Paser, Katsul Wijaya

PASER FOKUS STUNTING, TINGKATKAN PERAN TPPS

PASER - Upaya penurunan kasus gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting terus diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Terbaru, pihaknya melaksanakan peningkatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya mengatakan, peningkatan jumlah penduduk dianggap sebagai ancaman jika kasus stunting masih ada. Sehingga hal tersebut dinilai berdampak bagi manfaat generasi produktif.

"Dapat terhambat jika stunting masih menjadi ancaman buat kita. Kalau generasi produktif tidak berkualitas akibat stunting," kata Katsul Wijaya.

Dengan begitu, Pemkab Paser telah menetapkan 20 lokasi fokus intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi, sesuai Surat Keputusan Bupati Paser nomor 050/Kep-80/2022.

Pada data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Paser mengalami peningkatan mencapai 1,3 persen dari 23,6 persen pada 2021 menjadi 24,9 persen atau berada di atas rata-rata nasional yaitu 21,6 persen.

Pemkab Paser selalu mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi antar lintas sektor dan daerah, mulai dari intervensi hulu hingga hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan pentahelix.

"Titik berat yang harus kita sikapi dan tindaklanjuti ialah terkait gizi, melalui ak-

ses masyarakat terhadap pangan bergizi, pencegahan keluarga berisiko stunting serta meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman seperti sarana air bersih dan sanitasi," ulasnya.

Berdasarkan arahan Bupati Paser, Fahmi Fadli, kata Katsul, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, berkoordinasi dan bersinergi melakukan pencegahan dan penurunan stunting agar capaian dapat ditingkatkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.

"Para camat juga diimbau melakukan gerakan secara massif serta inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat datang ke Posyandu," papar Katsul.

Sejauh ini, dijelaskan bahwa untuk seluruh kecamatan, kelurahan dan desa di Paser telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan diharapkan bisa bersinergi dengan semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Paser yang bebas stunting.

Sementara bagi kecamatan, kelurahan dan desa yang belum melakukan rembuk stunting diminta untuk segera melakukan rembuk, dengan menyatu padukan komitmen bersama, dan intensifkan komunikasi dengan tim kabupaten.

"Karena beban yang berat akan terasa ringan bila kita pikul bersama, semoga dengan meningkatkan sinergitas yang lebih solid lagi dari sebelum-sebelumnya," tandas Katsul.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI JUMAT
27 OKT 2023



KADISBUN KALTIM : USAHA PERKEBUNAN HARUS SIMETRIS DENGAN PRINSIP EKOLOGI DAN KULTURAL

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**

**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



KADISBUN KALTIM : USAHA PERKEBUNAN HARUS SIMETRIS DENGAN PRINSIP EKOLOGI DAN KULTURAL

SAMARINDA - Dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara teknis dan strategi perencanaan amat diperlukan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir dalam acara yang diprakarsai oleh GAPKI yang bekerja sama dengan International Labour Organisation (ILO) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (24/10/2023).

Pembangunan usaha perkebunan, tambah Muzakkir, selain untuk memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, juga harus memerhatikan perlindungan lingkungan.

"Perlindungan yang dimaksud yaitu dengan menjaga dan mengelola Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT), yang merupakan lahan memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural," paparnya.

"Alasannya, berbagai nilai ini amat penting, baik di tingkat tapak, daerah, nasional atau global sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021," tambah Muzakkir.

Dia juga bilang bahwa industri perkebunan kelapa sawit dinilai

penting terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Oleh sebab itu Pemprov Kaltim berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di sektor tersebut.

"Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja di semua tingkatan pendidikan," ujarnya.

Tak hanya itu, Muzakkir juga menegaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya cukup besar sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Menurut Muzakkir, salah satu cara mengukur efisiensi tenaga kerja adalah dengan menghitung produktivitas kerja, di mana produktivitas kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi dalam satuan waktu tertentu.

"Dan saat ini tenaga kerja perkebunan di Kalimantan Timur mencapai 319 ribu pada Perkebunan Besar Sawit (PBS), belum termasuk pekerja perkebunan rakyat yang ada," jelasnya.

Muzakkir membeberkan, kebutuhan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dipengaruhi

oleh luas kebun, jenis pekerjaan, topografi dan iklim, teknologi, komposisi/umur tanaman.

"Untuk itu pengelolaan tenaga kerja harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja penting untuk dilakukan dalam menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik," kata Muzakkir.

Lebih jauh Muzakkir menambahkan, pekerjaan dalam pemeliharaan cukup banyak memerlukan biaya dan tenaga, dan merupakan syarat untuk mendapatkan tanaman yang baik. Selain itu, kata dia, kegiatan perkebunan kelapa sawit berfluktuasi sepanjang tahun, karena adanya pekerjaan yang berkaitan dengan musim, lahan, curah hujan, dan bulan panen puncak dan panen rendah.

"Oleh karenanya perlu peningkatan kapasitas tenaga kerja perkebunan agar menghasilkan tenaga kerja yang cermat, efektif dan efisien. Dibaratkan bahwa tenaga kerja itu adalah perangkat lunak yang harus selalu dilakukan upgrade, agar pengelolaannya dapat memenuhi kaidah-kaidah yang telah dipersyaratkan," pungkasnya. (ADV)

Editor : Nicha Ratnasari



WANITA DI SAMARINDA TERTANGKAP BASAH JUAL SABU

SAMARINDA - Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang amankan seorang wanita yang kedapatan akan menjual narkoba jenis sabu di Jalan KH. Wahid Hasyim 2, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada Selasa (20/10/2023).

Kapolsek Sungai Pinang, Kompol Ahmad Abdullah mengungkapkan, personel mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan KH. Wahid Hasyim 2 sering terjadi transaksi narkoba kemudian personel melakukan upaya penyelidikan.

"Personel melihat seorang wanita duduk di atas sepeda motor dengan gerak - gerik mencurigakan dan benar saja saat personel melakukan pemeriksaan mendapati 1 poket sabu yang dibungkus tisu dalam genggam tangan kirinya," terang Kapolsek.

Tak sampai di situ, lanjut Kapolsek, personel mendapatkan barang bukti lain yaitu 1 poket sabu di dalam tas serta 2 poket sabu yang diselipkan dalam

sepatu warna putih kemudian disimpan dalam jok sepeda motor.

Wanita yang diketahui berinisial IW ini mengaku bahwa akan menjual sabu tersebut dengan harga Rp 150 ribu per poket.

IW beserta barang bukti 4 poket sabu seberat 0,85 gram bruto, 1 buah tas pinggang warna hitam, 1 buah sepatu warna putih, 2 lembar tisu dan sepeda motor Yamaha Mio Gear saat ini telah diamankan untuk proses penyidikan di Mako Polsek Sungai Pinang.

"Tersangka ini mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dibawanya memang akan dijual jadi tersangka kita jerat dengan pasal 114 sub Pasal 112 sub pasal Sub 132 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," pungkasnya. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi I DPRD Kaltim

POLDA KALTIM DI BAWAH KOMANDO BARU, JAHIDIN HARAP KEAMANAN KALTIM MENINGKAT

SAMARINDA - Jahidin selaku Anggota Komisi I DPRD Kaltim, memberikan dukungan kepada Irjen Pol Nanang Avianto yang baru saja didapuk sebagai Kapolda Kaltim.

Jahidin meyakini, di bawah komando Nanang Avianto, raihan yang telah diraih sebelumnya dapat dipertahankan. Dan kinerja Polda untuk pengamanan dan penegakan hukum di wilayah Kaltim semakin meningkat.

"Harapannya semua personil ikut mendukung arahan Kapolda, yang lebih diharapkan adalah peningkatan kinerja daripada kepolisian itu sendiri," ucap Jahidin kepada media ini, Kamis (26/10/2023).

Peran kepolisian di Kaltim, ujar Jahidin sangat penting untuk menjaga kondusivitas dan keamanan. Terlebih, dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kaltim. Proses pembangunan hingga pemindahan Ibu Kota kelak butuh keamanan yang tinggi.

"Apalagi IKN mau dijadikan tempat up-acaranya Presiden pada 17 Agustus 2024. Kapolda harus memastikan wilayah tersebut aman dan tertib," bebernya.

Selain itu terang Politisi PKB ini, pihak kepolisian punya tugas penting dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Termasuk memberikan informasi dalam kaitannya dengan kerawanan-kerawanan yang dipandang mengganggu ketentraman masyarakat di Kaltim. Peran ini ucapnya, akan menjadi tugas Satgas Humas pengamanan Pemilu yang baru saja dibentuk. "Hal ini agar tidak ada isu-isu yang menyesatkan atau hoaks yang bisa merusak situasi Kamtibmas di Kaltim," pungkasnya.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim, M Adam Sinte

M. ADAM SOROTI SULIT DAN MAHALNYA TRANSPORTASI, WISATAWAN ENGGAN MELANCONG KE BERAU

BERAU - Legislator Fraksi PKB - Hanura, M Adam Sinte menyoal harga tiket pesawat ke Berau yang mahal. Dampaknya, wisatawan harus berpikir dua kali untuk mengunjungi Berau yang tersohor dengan keindahan pantai dan lautnya.

Ia mengambil perbandingan harga tiket pesawat ke Bali yang lebih murah ketimbang ke Berau. Praktis, pelancong khususnya dari dalam negeri lebih memilih Bali sebagai destinasi wisatanya.

"Kalau dilihat wisatawan yang datang ke Bali lebih banyak dari pada ke Berau, karena biaya yang mahal sampai ke sini. Kalau ke Bali, hanya dengan biaya Rp 2 juta sudah sampai, tapi ke sini biayanya lebih banyak, sampai Rp 5 juta lebih," bebernya.

Sama halnya bila melalui jalur darat ke Berau, infrastruktur jalan menuju Berau tidak dalam kondisi mantap. Termasuk fasilitas, sarana dan prasarana penjung disana yang kurang memadai. Bila tidak ada pembenahan, ia khawatir jumlah wisatawan menuju beberapa destinasi wisata yang ada di Berau terus menurun.

"Belum lagi biaya transportasi mahal dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada jumlah kedatangan wisatawan ke tempat tersebut," tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini lebih lanjut mengatakan, Pemprov Kaltim harus hadir mengatasi persoalan tersebut. Mulai dari perbaikan kondisi jalan, akses dan fasili-

tas penunjang lainnya. Musabab potensi parawisata yang dimiliki Berau sangat besar untuk memberikan kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kaltim.

"Kalau jalan-jalan sudah mulus, walaupun wisatawan yang datang harus lewat darat, tapi mereka bisa menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Yang paling penting adalah kita siapkan rest area untuk beristirahat, itu harus jadi perhatian utama. Jadi mereka bisa singgah di sana, tempatnya juga harus bersih dan nyaman, karena kita sepakat bahwa Kaltim memiliki destinasi wisata andalan bisa di jual," jelasnya.

Ia menerangkan, bahwa rusaknya sejumlah ruas jalan menuju Berau disebabkan aktivitas kendaraan tambang batu bara dan kelapa sawit. Padahal, sudah ada payung hukum yang jelas mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus. Sehingga ia meminta ada tindak tegas dari Pemprov Kaltim dan penegakan hukum.

"Tapi memang banyak kendala kita. Saya dapat informasi, jalan-jalan kita, jalan negara, jalan provinsi masih dikuasai truk-truk pengangkut CPO dan batubara, padahal Perda kita sudah mengharuskan mereka membuat jalan khusus, kecuali crossing jalan tapi itu harus ada izin juga. Ini harus dibenahi," pungkasnya. **(eky/adv/dprd-kaltim)**

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

**Deluxe Room**

ONLY

~~Rp 698.000,-~~**30% OFF****Rp 488rb**

NETT/NIGHT

benefits**Breakfast**
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs**BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com